

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang sering ditemukan pada perekonomian pada suatu negara. Sehingga pemerintah dalam hal ini sebagai pengambil kebijakan dalam suatu negara harus mampu memberikan berbagai kebijakan yang tepat dan berpihak terhadap masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan (Chambers, 2010). Sehingga masyarakat yang berada pada suatu kondisi dalam lingkup garis kemiskinan dapat keluar dari situasi sulit tersebut. Kemiskinan juga berakibat pada keterbatasan seseorang untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup yang berakibat pada rendahnya kualitas standar hidup dan kesejahteraan yang dimiliki (Kadji, 2004). Meskipun pulau Jawa memiliki tingkat pembangunan ekonomi yang cukup lebih baik apabila dibandingkan dengan pulau atau daerah lain yang ada di Indonesia. tetapi kemiskinan masih menjadi masalah yang perlu menjadi perhatian khususnya di Provinsi Jawa Tengah.

Menurut Hudiyanto (2013) Kemiskinan merupakan sebuah masalah yang sering dialami oleh negara-negara terutama bagi negara yang masih didalam kategori negara berkembang. oleh sebab itu kemiskinan sebagai sebuah masalah sosial perlu perhatian khusus untuk dapat diatasi hal ini karena kemiskinan berdampak pada menimbulkan suatu kondisi yang mengakibatkan tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi rendah sehingga pengambilan suatu

kebijakan publik harus efektif dalam menekan kemiskinan. Karena kemiskinan merupakan sebuah permasalahan sosial yang memiliki dampak terhadap taraf kehidupan bagi setiap individu oleh karena itu perlu berbagai solusi yang mampu memberi dampak positif. Permasalahan kemiskinan juga Allah SWT jelaskan dalam firmanNya pada surat Al-An'am Ayat 141 :

مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ جَدَّاتٍ أَنْشَأَ الَّذِي وَهُوَ
مُتَشَابِهًا وَالرُّمَّانَ وَالزَّيْتُونَ أَكُلُهُ مَخْتَلِفًا وَالزَّرْعَ وَالنَّخْلَ
يَوْمَ حَقَّهُ أَوْأْتُوا ثَمَرَ إِذَا ثَمَرَهُ مِنْ كُلُوا ۖ مُتَشَابِهٍ وَغَيْرِ
الْمُسْرِفِينَ يُحِبُّ لَا إِنَّهُ ۖ تُسْرِفُوا وَلَا ۖ حَصَادِهِ

“Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, Pohon Korma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah dan tunaikanlah hak di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin) dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”

Sehingga dari ayat tersebut seharusnya di jadikan pengingat bagi pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk terus dapat memberikan kebijakan dan solusi yang mampu mengeluarkan masyarakat miskin dari situasi sulit yaitu kondisi kemiskinan. Sehingga sebagai pihak yang memiliki kuasa dan tanggung jawab akan permasalahan pembangunan ekonomi dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus bersikap amanah dan adil dalam meningkatkan kesejahteraan dan mampu untuk membuat suatu kebijakan yang efektif dalam menekan angka kemiskinan sehingga dapat menciptakan suatu keadaan sosial masyarakat yang memiliki kondisi taraf kehidupan yang layak dan sejahtera.

Pada penelian ini penulis menentukan lokasi dalam penelitian ini pada Provinsi Jawa Tengah hal ini karena Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu dari beberapa provinsi yang memiliki jumlah penduduk miskin yang cukup besar di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (2019) Provinsi yang memiliki jumlah penduduk miskin terbesar di Indonesia pada tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut ini :

Tabel 1.1

Provinsi dengan Jumlah Penduduk Miskin terbesar di Indonesia
Tahun 2013-2018

Tahun	Jawa Timur	Jawa Tengah	Jawa Barat	Sumatera Utara
2013	4.893.300	4.811.400	4.375.200	1.400.000
2014	4.784.400	4.561.830	4.239.000	1.360.600
2015	4.789.180	4.577.000	4.435.700	1.463.670
2016	4.703.300	4.506.800	4,224.360	1.455.000
2017	4.617.900	4.455.720	4.168.440	1.453.870
2018	4.332.510	3.897.200	3.615.400	1.324.930

Sumber : Badan Pusat Statistik

Pada Tabel 1.1 kondisi kemiskinan pada setiap masing-masing Provinsi mengalami fluktuatif. Provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbesar berada pada Provinsi Jawa Timur dengan nilai maksimal terjadi pada tahun 2013 sebesar 4.893.300 jiwa. Provinsi Jawa Tengah berada pada posisi kedua dengan jumlah nilai maksimal penduduk miskin sebesar 4.811.400 jiwa pada tahun 2013. Provinsi Jawa Barat berada pada posisi ketiga dengan nilai maksimal jumlah penduduk miskin sebesar 4.375.200 jiwa pada tahun 2013. dan Provinsi Sumatera Utara dengan berada pada urutan terakhir dengan nilai maksimal 1.400.000 jiwa pada tahun 2013.

Perkembangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dalam beberapa tahun terakhir mengalami Fluktuatif. Namun hal ini tentu saja belum menjadikan Provinsi Jawa Tengah bebas dari kemiskinan. Perkembangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2013 hingga 2018 sebagai berikut :

Tabel 1.2

Jumlah Penduduk Miskin dan Presentase Penduduk Miskin
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
2013	4.811.400	14,44
2014	4.561.830	13,58
2015	4.577.000	13,65
2016	4.506.800	13,27
2017	4.455.720	13,01
2018	3.897.200	11,32

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah 2019

Pada Tabel 1.2 bahwa jumlah penduduk miskin dari tahun 2013-2018 mengalami Fluktuatif dan mulai mengalami penurunan pada tahun 2017 hingga 2018. Pada tahun 2013 jumlah penduduk miskin sebesar 4.811.400 jiwa dengan persentase penduduk miskin sebesar 14,44% pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin sebesar 4.561.830 jiwa dengan persentase penduduk miskin sebesar 13,58% pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin sebesar 4.577.000 Jiwa dengan persentase penduduk miskin sebesar 13,65% pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin sebesar 4.506.800 jiwa dengan persentase jumlah penduduk miskin sebesar 13,27% pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin sebesar 4.455.720 Jiwa dengan persentase sebesar 13,01% dan pada tahun

2018 jumlah penduduk miskin sebesar 3.897.200 jiwa dengan persentase jumlah penduduk miskin sebesar 11,32% sehingga diperoleh kesimpulan bahwa jumlah penduduk miskin mengalami fluktuasi tetapi pada 3 tahun terakhir terus mengalami penurunan.

Dari berbagai satrategi pembangunan ekonomi yang di jalankan oleh pemerintah yang memiliki andil dalam peningkatan kesejahteraan dan menekan angka kemiskinan yaitu adalah PDRB Berikut merupakan besaran PDRB di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 :

Tabel 1.3

Produk Domestik Regional Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi
Provinsi Jawa Tengah 2013-2018.

Tahun	PDRB (Juta Rupiah)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2013	726.655.118,06	5,11
2014	764.959.150,95	5,27
2015	806.765.091,17	5,47
2016	849.099.354,69	5,25
2017	893.750.437,17	5,26
2018	941.283.278,28	5,32

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah 2019

PDRB adalah sebuah aspek yang cukup penting dalam peningkatan kesejahteraan. Pada Tabel 1.3 jumlah PDRB Jawa Tengah pada tahun 2013 sebesar 726.655.118,06 juta dengan pertumbuhan ekonomi 5,11% pada tahun 2014 sebesar 764.959.150,95 juta dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,27% pada tahun 2015 sebesar 806.765.091,17 juta dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,47% pada tahun 2016 sebesar 849.099.354,69 juta dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,25% pada tahun 2017 sebesar 893.750.437,17

dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,26% dan pada tahun 2018 sebesar 941.283.278,28 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,32%.

PDRB sendiri merupakan seluruh nilai barang dan jasa pada suatu wilayah tertentu dalam satuan hitungan satu tahun Nugroho dan Rhamdani (2015). Data pada Tabel 1.2 diperoleh kesimpulan bahwa jumlah PDRB Provinsi Jawa tengah terus mengalami kenaikan dan dari segi pertumbuhan ekonomi hal tersebut akan berdampak cukup baik bagi perekonomian.

Aspek PDRB yang memiliki kaitan dengan tingkat kesejahteraan ekonomi tentu saja memiliki unsur penting dalam pengentasan kemiskinan Bintang dan Woyanti (2018). Dengan meningkatnya tingkat PDRB akan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah sehingga memberikan harapan pada masyarakat sehingga tingkat kesejahteraan mampu di tingkatkan dan taraf hidup masyarakat akan terus meningkat. Hal ini tentu saja dapat di wujudkan apabila pemerintah mampu memberikan kebijakan dan solusi yang tepat pada strategi pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah.

Masalah kependudukan juga memiliki andil dalam memperparah tingkat kemiskinan yang ada sehingga apabila tidak dapat dikendalikan akan berdampak negatif terhadap tingkat kemiskinan dan dalam hal ini perlu menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan-kebijakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan. Apabila jumlah penduduk tidak diikuti dengan terbukanya lapangan kerja dan perbaikan pada taraf hidup akan

berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan berikut ini merupakan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 :

Tabel 1.4

Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Provinsi Jawa Tengah 2013-2018

Tahun	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
2013	33.264.339	0,80
2014	33.522.663	0,77
2015	33.774.141	0,75
2016	34.019.095	0,72
2017	34.257.865	0,71
2018	34.490.835	0,68

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah 2019

Pada Tabel 1.4 data jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013 sebesar 33.264.339 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,80% pada tahun 2014 sebesar 33.522.663 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,77% pada tahun 2015 sebesar 33.774.141 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,75% pada tahun 2016 sebesar 34.019.095 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,72% pada tahun 2017 jumlah penduduk sebesar 34.257.865 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,71% dan pada tahun 2018 jumlah penduduk sebesar 34.490.835 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,68%.

Pada Tabel 1.4 diperoleh kesimpulan bahwa jumlah penduduk di provinsi jawa tengah terus mengalami kenaikan akan tetapi dari segi laju pertumbuhan yang ada terus mengalami penurunan. penduduk dalam suatu

perekonomian Menurut Sukirno (2005) Penduduk merupakan sebuah unsur yang penting dalam suatu pembangunan ekonomi.

Dalam upaya menekan permasalahan tingkat kemiskinan aspek peningkatan sumber daya manusia sangat diperlukan oleh karena itu pendidikan merupakan aspek dasar bagi kemajuan suatu negara maupun suatu daerah. berikut ini adalah jumlah rata-rata lama sekolah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 :

Tabel 1.5

Rata-rata lama sekolah di Provinsi Jawa Tengah 2013-2018

TAHUN	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)
2013	6.80
2014	6.93
2015	7.03
2016	7.15
2017	7.27
2018	7.35

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah 2019.

Pada Tabel 1.5 menunjukkan bahwa dari tahun 2013-2018 jumlah rata-rata lama sekolah Provinsi Jawa Tengah terus mengalami peningkatan sehingga hal ini perlu untuk terus dipertahankan . Pada tahun 2013 jumlah rata-rata lama sekolah sebesar 6.80 tahun pada tahun 2014 jumlah rata-rata lama sekolah sebesar 6.93 tahun pada tahun 2015 jumlah rata-rata lama sekolah sebesar 7.03 tahun pada tahun 2016 jumlah rata-rata lama sekolah sebesar 7.15 tahun pada tahun 2017 jumlah rata-rata lama sekolah sebesar 7.27 tahun dan pada tahun 2018 jumlah rata-rata lama sekolah sebesar 7.35 tahun.

Penyediaan Fasilitas dan sistem pendidikan yang baik dan mampu diakses merupakan sebuah upaya dari pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang tergolong kurang mampu sehingga terus dapat melanjutkan pendidikan sampai kejenjang yang lebih tinggi Azami (2009). Oleh karena itu berbagai kebijakan subsidi pada suatu bidang pendidikan tersebut perlu didukung dan terus untuk ditingkatkan sebaik mungkin sehingga fasilitas dan kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Provinsi Jawa Tengah.

Berbagai kebijakan yang bertujuan untuk menekan angka kemiskinan berupa perbaikan dibidang sumber daya manusia dan peningkatan produktivitas pendapatan masyarakat apabila tidak dilakukan dengan perencanaan pembangunan yang matang dan sesuai dengan rencana yang dilakukan pada masyarakat tidak akan memberikan pengaruh yang besar terhadap menekan angka kemiskinan. Karenanya kemiskinan juga banyak dipengaruhi oleh aspek meningkatnya baik harga barang dan jasa yang di sebabkan oleh inflasi sehingga perlu adanya perhatian khusus untuk mengawasi laju dari inflasi yang ada sehingga tidak berdampak buruk terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan.

Permasalahan inflasi sendiri memiliki andil yang cukup besar terhadap penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat hal ini karena laju inflasi yang tinggi namun tidak diikuti dengan peningkatan pendapatan masyarakat hanya akan menyebabkan masyarakat akan sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-

hari dan berdampak pada meningkatnya jumlah angka kemiskinan Hambarsari dan Inggit (2016). Sehingga dalam strategi menekan angka kemiskinan inflasi perlu mendapatkan perhatian serius dari pengambil kebijakan dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk dapat memberikan solusi yang tepat dan efektif dalam menekan angka kemiskinan.berikut ini merupakan perkembangan inflasi di Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 :

Tabel 1.6

Tingkat inflasi di Provinsi Jawa Tengah 2013-2018

TAHUN	Inflasi Provinsi Jawa Tengah
2013	7.99
2014	8.22
2015	2.73
2016	2.36
2017	3.71
2018	2.82

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah 2019

Pada Tabel 1.6 dapat diketahui bahwa tingkat inflasi di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2018 dalam kondisi yang cenderung kurang stabil atau naik turun. Pada tahun 2013 inflasi Jawa Tengah sebesar 7.99 pada tahun 2014 inflasi Jawa Tengah sebesar 8.22 pada tahun 2015 inflasi Jawa Tengah sebesar 2.73 pada tahun 2016 inflasi Jawa Tengah sebesar 2.36 pada tahun 2017 inflasi Jawa Tengah sebesar 3.71 dan pada tahun 2018 inflasi Jawa Tengah sebesar 2.82 sehingga kondisi inflasi di Jawa Tengah pada tahun 2013-2018 pada kondisi yang cenderung fluktuatif.

Dalam usaha meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat faktor inflasi merupakan salah satu aspek yang perlu diberikan penanganan yang lebih. Sehingga pembangunan ekonomi akan berdampak pada hasil yang baik. Mengingat tingginya inflasi merupakan sebuah indikasi bahwa telah terjadi kondisi yang kurang baik terhadap perekonomian di suatu wilayah maupun di suatu negara karena inflasi memiliki dampak terhadap peningkatan terhadap harga barang dan jasa Ketut dan Dewi (2016).

Pada berbagai penjelasan yang telah dibahas diatas dapat diketahui bahwa penelitian mengenai kemiskinan sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya yang dapat memberikan gambaran dan informasi kepada peneliti untuk dapat mengambil langkah-langkah yang akan diambil di dalam penelitian ini khususnya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Susanti, (2016) bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Lalu hasil penelitian tersebut juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Susilowati dan Hadi, (2017) dan bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Namun penelitian yang dilakukan oleh Wibisono (2015) dan Permana (2012) memberikan hasil bahwa PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Permasalahan kemiskinan yang merupakan sebuah masalah yang cukup kompleks Niswati (2014). Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan-kebijakan untuk menekan angka kemiskinan namun kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah masih menjadi masalah yang masih perlu dicarikan

berbagai solusi dan penyelesaian dari berbagai aspek yang mempengaruhi tinggi dan rendahnya kemiskinan. Faktor jumlah penduduk yang besar juga ditengarai memiliki pengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2017) Pradana (2017) Saputra (2011) bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan namun dari penelitian yang dilakukan oleh Kumalasari (2011) dan Mahsunah (2013) bahwa Jumlah penduduk memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan.

Sehingga aspek permasalahan kependudukan dalam hal ini yang menyangkut jumlah penduduk perlu diberikan suatu perhatian khusus. Menurut Adam Smith dalam Silastri dan Sari (2017) Jumlah penduduk yang tinggi pada hakikatnya memberikan potensi pada peningkatan produksi. Namun apabila besarnya jumlah penduduk tidak diikuti dengan meningkatnya sumber daya manusia, pendapatan dan produktivitas tentu nya hal ini akan berdampak kurang baik terhadap perekonomian.

Dalam upaya menekan angka kemiskinan aspek sumber daya manusia yang berkaitan dengan pendidikan juga perlu di perhatikan sebagai strategi pembangunan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2012) dan Astobe (2018) mengenai masalah pendidikan dalam hal ini rata-rata lama sekolah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Miswanda (2017) dan Bintang dan Woyanti (2018) bahwa Rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dan pada penelitian . Sehingga kebijakan yang

memiliki pengaruh terhadap peningkatan mutu dan kualitas pendidikan merupakan sebuah kunci dalam menekan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

Kemiskinan yang merupakan sebuah permasalahan multidimensi hal ini karena kemiskinan dapat mempengaruhi ketidakmampuan seseorang dalam memperoleh akses secara ekonomi, sosial budaya, politik dan partisipasi sosial di dalam kehidupan masyarakat Nurwati (2008). Berkaitan dengan aspek pemenuhan kebutuhan hidup yang berupa sandang, pangan dan papan. Hal ini tentu saja tidak terlepas dengan pengaruh harga barang dan jasa yang ada. Naiknya harga barang dan jasa yang terjadi tidak terlepas dari tingginya tingkat inflasi yang berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

Beberapa penelitian yang membahas tentang peran pengaruh inflasi terhadap kemiskinan telah dilakukan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2015) Yudha (2013) dan Putri (2015) bahwa inflasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Susanto dan Ulfah (2018) dan Oktayoga (2017) menyatakan bahwa inflasi memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Novianto (2018) Salam (2019) Aji (2019) variabel independen inflasi memiliki pengaruh yang negatif signifikan

Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai variabel independen yang ada didalam penelitian ini memiliki perbedaan dan ketidak konsistenan hasil.

Pada variabel independen PDRB bahwa menurut penelitian yang dilakukan Susanti (2016) Hasan (2016) Susilowati dan Hadi (2017) yang menyatakan bahwa PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan tetapi menurut penelitian yang dilakukan oleh Wibisono (2015) dan Yoga (2010) Wiguna (2013) bahwa PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Pada variabel jumlah penduduk menurut penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2017) Pradana (2017) Saputra (2011) dan Silastri, dan Sari (2017) bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Namun menurut Mahsunah (2013) dan Susilo (2017) bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan.

Pada variabel rata-rata lama sekolah dalam penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2012) dan Astobe (2018) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kemiskinan akan tetapi pada penelitian yang dilakukan oleh Miswanda (2017) dan Bintang dan Woyanti (2018) Ningtyas (2017) memberikan hasil bahwa rata-rata lama sekolah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Pada berbagai penelitian yang telah dilakukan diatas dan apabila dilihat dari pernyataan variabel independen PDRB, variabel independen Jumlah Penduduk, variabel independen Rata-rata lama Sekolah dan variabel independen Inflasi diatas yang kurang konsisten dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap kemiskinan timbul celah bagi peneliti untuk dapat melakukan penelitian hubungan antara variabel independen PDRB,

variabel independen jumlah penduduk, variabel rata-rata lama sekolah dan variabel independen inflasi terhadap variabel dependen tingkat kemiskinan. Perbedaan-perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah aspek lokasi penelitian yang berbeda didalam penelitian ini penulis mengambil keputusan bahwa lokasi yang penulis pilih dalam penelitian ini adalah berada pada Provinsi Jawa Tengah. Tahun penelitian yang berbeda yaitu tahun awal penelitian dilakukan pada tahun 2013 sampai dengan akhir tahun penelitian pada tahun 2018 di dalam penelitian ini menggunakan variabel independen rata-rata lama sekolah yang jarang di jadikan sebagai variabel independen penelitian terhadap kemiskinan yang ada di Provinsi Jawa Tengah ataupun pada penelitian yang mengambil tema penelitian tentang kemiskinan. Sehingga dalam hal ini penulis kembali tertarik dan mengambil keputusan untuk meneliti apakah variabel independen PDRB, variabel independen Jumlah Penduduk, variabel independen Rata-rata lama sekolah dan variabel independen Inflasi memiliki pengaruh terhadap variabel dependen tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.

Berdasarkan Latar belakang diatas mengenai variabel yang meliputi PDRB, Inflasi, Rata-rata lama sekolah dan Jumlah Penduduk yang ada di Provinsi Jawa Tengah sehingga dalam hal ini penulis ingin melakukan sebuah penelitian yang berjudul ***“Analisis Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk, Rata-Rata Lama Sekolah dan Inflasi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018”***

B. Rumusan Masalah :

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang yang telah dibahas diatas, dalam penelitian ini maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah PDRB berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2018.
2. Apakah Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2018.
3. Apakah Rata-rata lama sekolah berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2018.
4. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2018.

C. Tujuan Penelitian :

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen PDRB, Jumlah Penduduk, Rata-rata Lama Sekolah dan Inflasi terhadap variabel dependen Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 :

1. Menganalisis pengaruh dari PDRB terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2018.
2. Menganalisis pengaruh dari Jumlah Penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2018.

3. Menganalisis pengaruh dari rata-rata lama sekolah terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2018.
4. Menganalisis pengaruh dari inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2018.

D. Manfaat Penelitian :

Adapun berbagai manfaat yang akan di peroleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis.

- a. Bagi penulis penelitian ini merupakan sebuah langkah bagi penulis untuk menerapkan berbagai pengetahuan dan pemahaman yang didapatkan pada bangku kuliah
- b. Sebagai salah satu sumber informasi yang memiliki fungsi untuk mengetahui suatu perkembangan tingkat kemiskinan yang ada di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2018.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat penelitian yang penulis lakukan ini berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai kemiskinan dan perkembangan suatu kondisi kemiskinan yang ada di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2018.

b. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat dijadikan sebagai saran dan masukan bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kemiskinan sehingga akan berdampak pada upaya peningkatan tingkat taraf kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah.